

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Tambang

Edisi : 07 Maret 2013
Halaman : 22

PERTAMBANGAN

100 Titik Tambang Batubara Tanpa Izin

BANJARMASIN, KOMPAS - Jumlah pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai 100 titik. Tambang-tambang tersebut beroperasi secara tersembunyi, termasuk di dalam hutan. Bahkan, pelaku disinyalir mulai merambah kawasan hutan lindung.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Rakhmadi Kurdi, di Banjarmasin, Rabu (6/3), mengatakan, tengah menyebar orang khusus memantau kawasan tambang. Diterjunkan juga tim gabungan untuk melakukan penindakan.

Ada tiga kabupaten rawan penambangan ilegal, yakni Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Selain lokasinya terpencil, ketiga daerah itu memiliki sumber daya tambang yang cukup besar.

"Penambangan tanpa izin marak karena ada pembeli. Proses jual-beli bisa terjadi karena ada yang melegalkan, membuat surat-surat. Di sisi lain, pelabuhan khusus batubara bersedia memfasilitasi. Kalau di pelabuhan ditolak, orang tidak akan berani menambang tanpa izin," ujar Rakhmadi.

Rakhmadi mengakui, pihaknya menghadapi kendala penertiban. Jumlah polisi hutan hanya sekitar 150 orang sehingga tidak sebanding dengan luas wilayah. Seorang polisi hutan di Kalsel harus mengawasi lahan seluas 5.000 hektar. Apalagi, rata-rata mereka telah berumur 50 tahun. Persebaran polisi hutan juga banyak di kabupaten sehingga sulit dimobilisasi saat operasi.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Kalsel Brigadir Jenderal (Pol) Taufik Anshorie menuturkan, pihaknya sedang gencar menertibkan tambang liar. Selama Januari telah ditertibkan 20 tambang ilegal dengan barang bukti di antaranya 28 buah ekskavator, 1 bulldoser, dan 4 buah truk besar.

Di Jawa Barat, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya Yamin Yusuf mengingatkan, tambang pasir besi tidak memberikan keuntungan bagi warga di daerah itu. Pengelolaan yang belum optimal telah membuat penambangan pasir besi justru memicu kerusakan infrastruktur dan lingkungan.

"Laporan masyarakat dan bukti di lapangan menyebutkan pasir besi masih memicu kerusakan lingkungan," kata Yusuf, di Tasikmalaya, Rabu (6/3).

Potensi pasir besi sekitar 6,6 juta ton, dan mulai ditambang menggunakan alat berat sejak 2007. Potensinya tersebar di pesisir pantai Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal, dan Kecamatan Cicalong. Kesejahteraan yang diharapkan dari tambang ini belum terwujud. "Pasir besi hanya menyumbangkan pendapatan sekitar Rp 500 juta per tahun," katanya.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya Najmudin Azis mengaku masih memperketat izin penambangan pasir besi. Untuk izin baru, perusahaan diwajibkan memenuhi syarat lebih ketat, di antaranya punya izin usaha pertambangan dan jaminan melakukan reklamasi kawasan bekas penambangan. (WER/CHE/INK)